

**PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN  
SOLOK SELATAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**YURIZATUL FADILAH**  
**2010012111043**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 10/Skripsi/HTN/VII-2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 10/Skripsi/HTN/VII-2024

Nama : Yurizatul Fadilah

NPM : 2010012111043

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul/Skripsi : PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H

(Pembimbing)



(.....)

# PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Yurizatul Fadilah<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [fadilahyurizatul@gmail.com](mailto:fadilahyurizatul@gmail.com)

---

## ABSTRAC

*Based on Article 44 of Regional Regulation Number 3 of 2016 in South Solok Regency concerning Environmental Protection and Management, waste disposal must meet environmental quality standards and support sustainable development at the local level. Problem formulation: 1.) How is the supervision carried out by the Housing, Settlement Area, Environment and Transportation Service of South Solok Regency, 2.) What are the obstacles faced by the Housing, Settlement Area, Environment and Transportation Service of South Solok Regency, 3.) What are the efforts made by the Housing, Settlement Area, Environment and Transportation Service of South Solok Regency. Sociological legal research consisting of primary data and secondary data, data collection techniques by interview and document study, qualitative data analysis. Research results: 1.) Supervision carried out by the Housing, Settlement Area, Environment and Transportation Service of South Solok Regency: Supervision of Activities/Businesses, and supervision of public complaint management. 2.) Obstacles faced by the Department of Housing, Residential Areas, Environment and Transportation of South Solok Regency: Supervision by supervisory staff and public complaints, lack of Human Resources, many objects of supervision being supervised, Proof of mistakes in pollution, lack of integration of supervision systems and changes in authority. 3.) Efforts made by the Department of Housing, Residential Areas, Environment and Transportation of South Solok Regency: Assistance and supervision by environmental control officers, additional personnel, maximizing technology and increasing coordination with the central government.*

**Keywords:** *Supervision, Factory Waste Disposal, Regional Regulations.*

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan ruang di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia memiliki peran yang kompleks dalam menjaga dan mengelola lingkungan tidak hanya sebagai penghuni, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang ini

memperbolehkan pembuangan limbah ke lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Pengawasan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan hidup di tingkat lokal. Peraturan ini selaras dengan Undang-Undang nasional, menekankan bahwa setiap kegiatan pembuangan limbah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta harus memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Pendekatan berjenjang dari tingkat nasional hingga lokal ini memastikan bahwa upaya perlindungan

lingkungan dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, integrasi hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari peraturan nasional hingga peraturan daerah, mencerminkan upaya sistematis untuk melestarikan lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kesehatan masyarakat serta kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan

Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

3. Untuk menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*empiris*).
2. Sumber  
Sumber data terdiri dari data primer dan skunder.
3. Teknik pengumpulan  
Teknik yang digunakan dalam penelitian berbentuk *library research* dan wawancara.
4. Teknik analisis data  
Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.**

Pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Selatan mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan terhadap usaha/kegiatan dan pengawasan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung melibatkan kunjungan ke lokasi usaha atau kegiatan, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha atau melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIMPEL).

Proses pengawasan ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu

perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penilaian hasil pengawasan, tindak lanjut pengawasan, pelaporan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan tidak langsung, yang dilakukan melalui analisis data, mampu mengidentifikasi pelanggaran berulang dan potensi ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Ketika ancaman serius terdeteksi, langkah-langkah penegakan hukum dan tindakan perbaikan segera diambil oleh petugas pengawas lingkungan hidup (PPLH).

#### **B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mutia Suci Amanda mendapatkan beberapa kendala dalam pengelolaan limbah pabrik yaitu:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia,
2. Banyaknya objek yang diawasi,
3. Pembuktian kesalahan atas pencemaran lingkungan,
4. Belum maksimalnya pengintegrasian sistem pengawasan lingkungan hidup dengan instansi terkait,
5. Terjadinya perubahan kewenangan pengawasan lingkungan hidup setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.**

Upaya-upaya yang dilakukan seperti:

1. Pendampingan oleh Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup, dan Analis Lingkungan Hidup.
2. Menambah personel dan melakukan pembagian tugas.
3. Pejabat Pengawas lingkungan dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang baik
4. Untuk meningkatkan hubungan dengan pihak terkait dalam pengawasan usaha dan/atau kegiatan serta memanfaatkan dengan maksimal teknologi sistem informasi yang tersedia
5. Perlunya peningkatan koordinasi bersama pihak Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait kewenangan pengawasan.

### **4. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan langsung serta menelaah laporan, serta memastikan kepatuhan perusahaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah:
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia,
  - b. Kurangnya kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan.

- c. Kurang efektivnya pengawasan yang dilakukan.
3. Upaya-upaya yang dilakuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan:
  - a. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
  - b. Meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan,
  - c. Adanya kalaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

#### B. Saran

1. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan upaya untuk menanggapi masalah keterbatasan pengawasan lingkungan hidup.
2. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan.
3. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan.
4. Perlunya koordinasi antara perilaku kegiatan/usaha dengan pemerintahan setempat serta mendapatkan arahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

A.Rusdina, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawa.*

Yohannes Yahya, 2019 *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### C. Sumber Lain

Niman, E. M. 2019. *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam.*

Mutia Suci Amanda, 2024, *Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup Dan Perhubungan, Solok Selatan.*

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desman Fajri S.Ag., M.H
4. Penasehat Akademik, Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.